

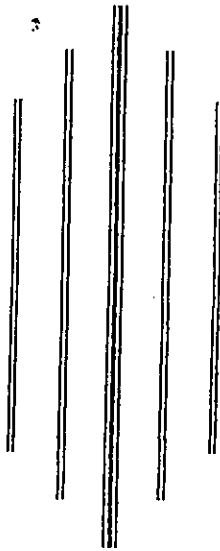


**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**NOMOR : 08 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PEMANCAR / TRANSMISI DAN  
TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



## **PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**NOMOR : 68 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

### **RETRIBUSI IZIN PEMANCAR/TRANSMISI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HILIR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pemancar/transmisi dan Telekomunikasi diperlukan penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.
  - b. bahwa setiap pemancar, pengiriman atau penerimaan dari setiap informasi baik dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan retribusi izin pemancar/transmisi dan telekomunisi dalam Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka penertiban;
  - c. bahwa untuk maksud point a dan b. diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754);
  - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1995 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor ..... Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
  - 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
dan  
BUPATI INDRAGIRI HILIR

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG RETRIUBUSI IZIN, PEMANCAR/TRANSMISI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir;
4. Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
9. Telekomunikasi adalah setiap Pemancar, Pengiriman data atau Penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, Isyarat Tulisan, Gambar, Suara dan Bunyi melalui sistem Kawat, optik, radio atau sistem Elektromagnetik lainnya.
10. Pemancar/Transmisi adalah merelay/mengulang siaran yang datang dari studio dan diteruskan ke pemirsa;
11. Penetapan lokasi adalah penetapan lokasi pembangunan Menara/Tower dan sejenisnya dan penerimaan kelengkapan teknis Telekomunikasi yang digunakan oleh Badan, Perusahaan dan Organisasi atau Perorangan untuk kelancaran komunikasi dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
12. Izin Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi adalah hak yang diberikan kepada penyelenggara pemancar/transmisi dan Telekomunikasi dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
13. Penyelenggara adalah perserorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.

## **BAB II NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi Dalam Wilayah Perairan Kabupaten Indragiri Hilir yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir;
- (2) Subjek retribusi adalah : Setiap Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mendapat pelayanan perizinan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Objek retribusi adalah :
  - a. Setiap pembangunan pemancar/transmisi dan Telekomunikasi didalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir;
  - b. izin atau Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pembangunan Menara/Transmisi dan Telekomunikasi yang berdiri dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

Retribusi Izin Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

## **BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**

### **Pasal 4**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian perizinan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengecekan dan pengukuran, pemeriksaan dan transportasi dalam rangka pengawasan dan poengendalian;

## **BAB IV DASAR PERHITUNGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Perizinan Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi dan sejenisnya ditetapkan dan dihitung berdasarkan ketinggian Antena/Tower/BTS yang dibangun

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 6**

Besarnya tarifi Retribusi Perizinan Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF
1.	TARIF RETRIBUSI UNTUK MENARA/ANTENA BTS TELEPON	
	A. Pengukuran Ketinggian /Tower/BTS	Rp 50.000 / Meter
	B. Pendirian Antena/tower/BTS	Rp 1,5% x RAB Antena/Tower/BTS
	C. Retribusi Antena/Tower/BTS per Tahun	Rp 12 x Rp 50.000 x Tinggi/M
	D. Retribusi sewa antenna/tower untuk perorangan BTS Telepon	Rp 10.000/Unit x 12 x Tinggi
2.	TARIF RETRIBUSI UNTUK MENARA/ANTENA/RADIO	
	A. Pengukuran ketinggian Antena/Tower radio siaran/radio panggil	Rp 50.000/unit
	B. Pendirian Antena/Tower radio panggil	Rp 1,5%x RAB Antena/Tower
	C. Antenna/.Tower Per 1 Tahun x Tinggi x M	12 x Rp 7.500 x Tinggi/M
3.	TARIF RETRIBUSI UNTUK MENARA ANTENA/TOWER RADIO KONSESI	
	A. Pengukuran Ketinggian Antena/Tower	Rp 50.000/Unit
	B. Antena/Tower	Rp 1,5 % RAB Antena/Tower
	C. Tower per 1 Tahun x 10% dari Tinggi/ M	12 x Rp 30.000/Unit
4.	TARIF RETRIBUSI UNTUK MENARA ANTENA/TOWER KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK (KRAP) DAN AMATIR (ORARI)	
	A. Pengukuran Ketinggian : Antena/Tower (Vertikal/Horizontal)	Rp 30.000/Unit
	B. Pendirian Antena/Tower	Rp 1,5% RAB/Antena
	C. Antena/Tower per 1 Tahun 10 % dari Tinggi	12 x Rp 3000/Unit
5.	TARIF RETRIBUSI IZIN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN MENARA DAN TOWER	Rp 1000.000,-/ Unit

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 7**

Retribusi terhutang dipungut diwilayah Kabupaten Indragiri Hilir didaerah tempat izin usaha diberikan;

## BAB VII PENGATURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan Telekomunikasi setelah terdapat persetujuan diantara para pihak;
- (2) Kepada Perusahaan, Organisasi dan Perorangan yang membangun Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi dan sejenisnya dalam Kabupaten Indragiri Hilir dikenakan retribusi.
- (3) Pengelolaan dan penerimaan jasa Pembangunan Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi dan sejenisnya dilakukan oleh Pemegang Kas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.

### Pasal 9

- (1) Penetapan lokasi pembangunan Menara/Tower wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Ketentuan tentang ayat (1) akan ditetapkan dalam peraturan Bupati Indragiri Hilir.

## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 11

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan daerah diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

## BAB X TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 12

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang (BUPLN) Negara ;
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 14

- (1) Barang siapa yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII KENTENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis penalsanaanya akan diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal **19** Maret 2005

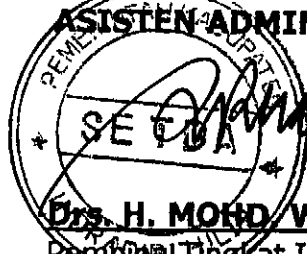
**BUPATI INDRAGIRI HILIR**

dto

**H. INDRA MUCHLIS ADNAN**

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal **23** Maret 2005

An. **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**ASISTEN ADMINSTRASI**



**Drs. H. MORD WARDAN**  
Pemimpin Tingkat I  
NIP. 010182183

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI C, NOMOR 08



**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**NOMOR. 08 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN PEMANCAR TRANSMISI DAN TELEKOMUNIKASI**  
**DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**I. UMUM**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, daerah diberi kesempatan luas untuk memungut Pendapatan Asli Daerah yang diperuntukan bagi pembangunan daerah itu sendiri.

Dalam penyelenggaraan telekomunikasian mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan mendukung terciptanya pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya.

Dalam rangka memanfaatkan, pengembangan jasa sektor telekomunikasi dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah, untuk menunjang pembangunan dan mendorong kegiatan perekonomian.

Berdasarkan uraian diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 16

Cukup jelas





**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**NOMOR : 09    TAHUN 2005**

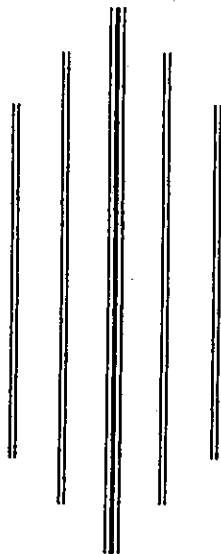
**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

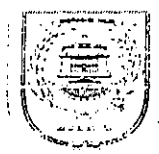
**NOMOR 15 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



# **PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : 09 TAHUN 2004**

## **T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HILIR**

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan pendapatan Asli Daerah serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka lokasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat perlu dipindahkan ke ibu kota kabupaten.
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor ) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504) ;
  8. Keputusan Presiden RI : 38 Tahun 1998, tentang Bank Perkreditan Rakyat ;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
dan  
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 42 Tahun 2002 yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29 Juli 2002 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah nomor 42 Seri D Nomor 42 dirubah beberapa pasal hingga berbunyi :

1. Ketentuan Pasal 2 dirubah sehingga berbunyi ;  
Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Indragiri Hilir yang diberi nama BANK PERKREDITAN RAKYAT GEMILANG (PD BPR GEMILANG) ;
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dirubah sehingga berbunyi ;
  - (1) Kantor Pusat PD. Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini berkedudukan di Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
  - (2) PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang dapat membuka/mempunyai Kantor Cabang atau Unit Pelayanan di Ibukota Kecamatan dan di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 19 Maret 2005

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 23 Maret 2005

An. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
ASISTEN ADMINISTRASI

